

AKTUALISASI BELA NEGARA MELALUI REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGERA

***Maudhy Satyadharma¹, Rina Sutriana², Sylsiani Mursalim³ Barmuddin⁴**

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara^{1,2}, Institut Mekongga³, DPD Legiun Veteran

Republik Indonesia⁴

maudhymaudhy@gmail.com¹

* Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini menganalisis aktualisasi bela negara melalui reformasi pelayanan publik di sektor perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bela negara dipahami sebagai tanggung jawab non-militer yang diwujudkan melalui profesionalisme, integritas, dan dedikasi aparatur sipil negara dalam menghadirkan layanan transportasi yang adil, aman, dan inklusif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dari wawancara, observasi, literatur, dan dokumen kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan, peningkatan keselamatan, penguatan integritas aparatur, serta perluasan konektivitas wilayah memperkuat kepercayaan publik dan kohesi sosial. Reformasi pelayanan transportasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi strategi ketahanan nasional non-militer yang menegaskan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil di Provinsi Sulawesi Tenggara..

Kata kunci: Bela Negara, Pelayanan Publik, Perhubungan, Transportasi

Abstract

This study analyzes the actualization of national defense through public service reform in the transportation sector in Southeast Sulawesi Province. National defense is understood as a non-military responsibility manifested through the professionalism, integrity, and dedication of state civil servants in providing fair, safe, and inclusive transportation services. The research method used a descriptive qualitative approach with data from interviews, observations, literature, and policy documents. The results of the study indicate that the digitalization of services, improved safety, strengthened civil service integrity, and expanded regional connectivity strengthen public trust and social cohesion. Transportation service reform not only increases efficiency but also serves as a non-military national resilience strategy that affirms the state's presence for all communities, including those in remote areas of Southeast Sulawesi Province.

Keywords: National Defense, Public Service, Transportation, Transportation

PENDAHULUAN

Konsep bela negara dalam konteks kekinian tidak lagi terbatas pada pertahanan bersenjata, tetapi mencakup seluruh upaya warga negara dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Murtopo et al., 2024; Soepandji & Farid, 2018; Tajrida et al., 2025). Bela negara bertransformasi menjadi nilai dasar yang diwujudkan melalui tanggung jawab profesional, etika pelayanan, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional (Akbar et al., 2024; Kusuma et al., 2024; Yunita et al., 2023). Dalam perspektif ini, aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara layanan publik memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat (Kustiningsih & Soleh, 2025; Yulianto & Harsoyo, 2023).



Pelayanan publik merupakan cerminan kualitas kehadiran negara (Hendrayady et al., 2023; Siagian, 2025). Ketika layanan publik berjalan lambat, tidak transparan, atau diskriminatif, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan menurun (Finanda et al., 2024). Sebaliknya, pelayanan yang cepat, adil, dan responsif akan memperkuat legitimasi negara serta menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap bangsanya (Steviani, 2020). Dengan demikian, reformasi pelayanan publik sesungguhnya merupakan bagian dari strategi non-militer dalam memperkuat ketahanan nasional.



Gambar 1 Pembekalan kepada P3K lingkup Sarprashub LLAJ Wil. Daratan dalam mendorong peningkatan kapasitas, kompetensi dan integritas sektor perhubungan Prov. Sulawesi Tenggara
Sumber : Asriyati et al. (2025)

Sektor perhubungan menjadi salah satu bidang pelayanan publik yang sangat vital (Maudia, 2024; Puspitasari et al., 2024). Transportasi tidak hanya berfungsi memindahkan orang dan barang, tetapi juga menghubungkan wilayah, membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan memperkuat integrasi nasional (Karim et al., 2023; Laode et al., 2025; Syaiful et al., 2025). Negara kepulauan seperti Indonesia sangat bergantung pada sistem transportasi darat, laut, dan udara yang andal (Hado et al., 2025; Sulisty & Satyadharma, 2025). Ketimpangan akses transportasi dapat memicu ketimpangan pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, bahkan menghambat persatuan nasional (Khoerottunnisa et al., 2025).

Reformasi birokrasi di sektor perhubungan dalam satu dekade terakhir menunjukkan perubahan signifikan, terutama melalui digitalisasi layanan, peningkatan standar keselamatan, serta transparansi perizinan (Ramadhany et al., 2025; Rusmanto et al., 2025). Transformasi ini sejalan dengan semangat *good governance* yang menekankan akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik (Mozin et al., 2025). Namun, reformasi tersebut perlu dimaknai lebih jauh sebagai bagian dari aktualisasi nilai bela negara, bukan sekadar pemenuhan indikator kinerja birokrasi (Putri et al., 2025).

Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara (Faridah et al., 2023; Putrantonio & Supriyono, 2025; Yulnelly & Setiyawati, 2022). Dalam pelayanan publik, nilai-nilai tersebut terwujud melalui dedikasi aparatur dalam melayani masyarakat tanpa diskriminasi, menjaga integritas, serta memastikan pelayanan menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah terpencil (Irawan et al., 2025). Pelayanan transportasi yang menjamin konektivitas daerah terluar, misalnya, merupakan bentuk nyata upaya menjaga keutuhan wilayah negara (Jinca & Humang, 2023; Rosyid et al., 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berkorelasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Akhyar, 2023; Muzaki et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan di sektor perhubungan tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi,

tetapi juga pada penguatan kohesi sosial dan ketahanan nasional (Bénichou, 2024). Di sisi lain, tantangan sektor perhubungan masih kompleks, meliputi keterbatasan infrastruktur, disparitas layanan antarwilayah, praktik maladministrasi, serta rendahnya budaya keselamatan transportasi (Ibrahim et al., 2024). Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis, tetapi memerlukan transformasi nilai dan budaya kerja aparatur sebagai bagian dari gerakan bela negara di sektor sipil.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis aktualisasi bela negara melalui reformasi pelayanan publik di sektor perhubungan. Kajian ini penting untuk memperluas pemahaman bahwa bela negara dapat diwujudkan melalui profesionalisme dan integritas pelayanan, sekaligus memperkuat argumentasi bahwa reformasi birokrasi merupakan bagian dari strategi ketahanan nasional non-militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait hubungan antara nilai bela negara dan reformasi pelayanan publik di sektor perhubungan. Data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, studi literatur, dokumen kebijakan pemerintah, laporan reformasi birokrasi sektor transportasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber literatur mencakup buku, artikel jurnal, regulasi, dan laporan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun informan penelitian ini akan diuraikan dalam Tabel 1 berikut

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Muhamad Rajulan, ST.,M.Si	Kadishub Sultra
2.	Syaiful, S.Pd.,M.AP	Kabid Angkutan Jalan Dishub Sultra
3.	Ringo Taufan Laode, S.Ip.,M.Sc	Kasie Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Dishub Sultra
4.	Tina Trisarana Silondae, SP.,MP	Plt. Ketua PD PPM Sultra

Sumber : Data Primer (2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bela Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik

Bela negara dalam konteks non-militer menekankan peran warga negara dalam menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab (Jamasy & Sunarto, 2025). ASN sebagai pelayan publik memiliki kewajiban moral untuk menghadirkan pelayanan yang profesional dan berintegritas (Widyastuti et al., 2024).

Sikap disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab aparatur merupakan manifestasi kesetiaan terhadap nilai Pancasila dan konstitusi. profesionalisme dan integritas ASN tidak hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga membentuk wajah negara di mata masyarakat (Hidayatullah, 2026). Setiap interaksi pelayanan menjadi ruang aktualisasi nilai kebangsaan, karena dari sanalah masyarakat menilai apakah negara hadir dengan adil dan manusiawi. Ketika aparatur bekerja tepat waktu, memberikan informasi yang jelas, serta menolak praktik gratifikasi, mereka sedang menanamkan budaya hukum dan etika publik (Soares, 2025).

Budaya ini berkontribusi pada terbentuknya tata kelola yang bersih dan berwibawa. Dalam jangka panjang, konsistensi sikap tersebut memperkuat legitimasi pemerintah, menumbuhkan kepercayaan sosial, serta menciptakan stabilitas nasional yang menjadi fondasi utama ketahanan negara di era tantangan global yang kompleks.



Gambar 2 Budaya Apel dalam mendorong peningkatan disiplin, integritas dan bela negara di lingkup Dishub Sultra
Sumber : Dishub Sultra (2025)

Dalam pelayanan transportasi, bela negara tercermin dari komitmen memastikan keselamatan penumpang, keandalan sarana, serta keterjangkauan akses (Rajulan et al., 2025). Setiap kebijakan yang menjamin konektivitas wilayah terpencil pada dasarnya merupakan bentuk pengorbanan sumber daya demi kepentingan nasional yang lebih luas (Naufal, 2024). Komitmen tersebut menuntut perencanaan yang berbasis risiko, pengawasan operasional yang konsisten, serta investasi berkelanjutan pada pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Keselamatan tidak boleh dipandang sebagai biaya, melainkan sebagai tanggung jawab moral negara terhadap warganya. Di sisi lain, keterjangkauan akses transportasi mencerminkan prinsip keadilan sosial, karena membuka peluang ekonomi dan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah terluar (Maulidya, 2025). Dengan demikian, pelayanan transportasi yang andal dan inklusif menjadi instrumen strategis dalam memperkecil kesenjangan wilayah sekaligus memperkuat persatuan nasional.

Reformasi Pelayanan Publik Sektor Perhubungan

Reformasi pelayanan publik di sektor perhubungan ditandai oleh digitalisasi layanan perizinan, penerapan sistem tiket elektronik, integrasi data transportasi, serta peningkatan standar keselamatan (Sari, 2024). Digitalisasi tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga mengurangi potensi korupsi dan pungutan liar (Pratiwi et al., 2025). Transparansi proses perizinan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Mokui et al., 2023; Sjachrawy et al., 2025).

Penerapan *e-ticketing* dan sistem pembayaran non-tunai di transportasi umum merupakan contoh inovasi yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna layanan (Setiawati et al., 2025). Digitalisasi sistem pembayaran juga meningkatkan transparansi pendapatan serta meminimalkan kebocoran yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan transportasi publik (Purnomo et al., 2020). Data perjalanan yang terekam secara elektronik memberikan dasar penting bagi perencanaan berbasis bukti, seperti penyesuaian rute, jadwal, dan kapasitas layanan sesuai pola mobilitas masyarakat.



Gambar 3 Inovasi E-Retribusi Dishub Sultra
Sumber : Dishub Sultra (2025)

Hal itu juga disadari oleh Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan berbagai inovasi sektor transportasi dalam mendorong kinerja layanan serta meningkatkan kenyamanan pengguna jasa. Dengan demikian, inovasi transportasi berbasis digital memperlihatkan bagaimana reformasi layanan berkontribusi pada efisiensi sistem sekaligus keberlanjutan pembangunan nasional.

Integritas Aparatur sebagai Pilar Bela Negara

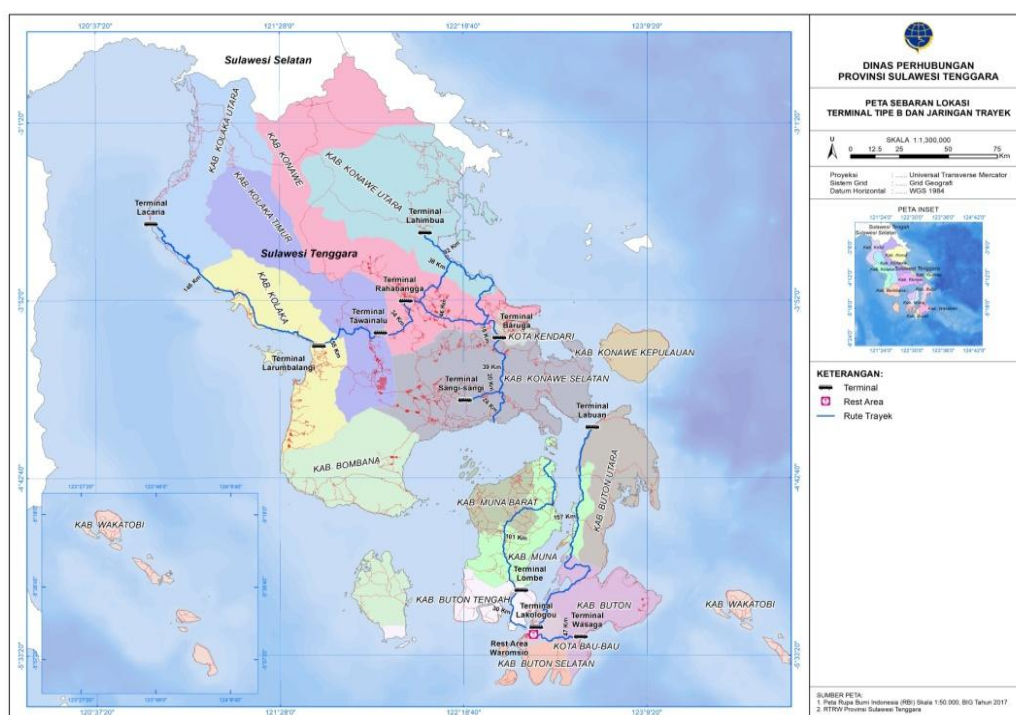
Integritas merupakan fondasi utama dalam pelayanan publik. Praktik korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang di sektor transportasi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan zona integritas dan budaya anti-korupsi menjadi bagian penting reformasi birokrasi (Trisia & Azairin, 2024). Pimpinan terus menerus mendorong pemahaman dan integritas setiap ASN dan P3K lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menanamkan komitmen, integritas dan nilai-nilai melayani masyarakat dengan ikhlas dan tanpa pamrih (Asriyati et al., 2025).

Aparatur yang bekerja dengan jujur dan profesional sesungguhnya sedang menjalankan nilai bela negara melalui pengabdian terbaiknya (Putri et al., 2025). Loyalitas terhadap kepentingan bangsa diwujudkan melalui pelayanan tanpa diskriminasi dan tanpa pamrih (Sunaini & Satyadharma, 2025).

Dan hal itu terus menerus disosialisasikan dan berusaha semaksimal mungkin diimplementasikan dalam pelayanan sektor transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Konektivitas Wilayah sebagai Strategi Ketahanan Nasional

Transportasi berperan besar dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Konektivitas antar pulau melalui transportasi laut dan udara mencegah isolasi daerah serta memperkuat interaksi sosial dan ekonomi. Ketika daerah terpencil terhubung dengan pusat pertumbuhan, rasa keadilan dan kebersamaan nasional akan meningkat (Candra et al., 2025). Pembangunan transportasi perintis dan subsidi angkutan di daerah tertinggal dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bentuk nyata bela negara oleh pemerintah, karena menunjukkan bahwa negara hadir untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali.



Gambar 4 Sebaran Lokasi Terminal Tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : Dishub Sultra (2025)

Kondisi ini sangat relevan dengan karakteristik Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas 17 kabupaten/kota dengan bentang wilayah kepulauan dan daratan yang tersebar. Ketergantungan pada transportasi laut, penyeberangan, menjadi kunci mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Tanpa konektivitas yang memadai, wilayah kepulauan berisiko tertinggal secara ekonomi dan sosial, sehingga penguatan jaringan transportasi menjadi instrumen strategis dalam menjaga integrasi wilayah sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Partisipasi Masyarakat dan Budaya Keselamatan

Bela negara juga memerlukan partisipasi masyarakat (Kartono & Fatmawati, 2020). Kesadaran pengguna transportasi dalam mematuhi aturan lalu lintas, menjaga fasilitas umum, dan mengutamakan keselamatan merupakan kontribusi nyata terhadap ketertiban nasional.

Reformasi pelayanan harus dibarengi edukasi publik agar tercipta budaya keselamatan transportasi (Yunus et al., 2024). Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menciptakan ekosistem transportasi yang lebih tangguh. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, muncul rasa

memiliki terhadap fasilitas publik yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial (Latullah et al., 2025).



Gambar 5 Kegiatan Penegakan Hukum Angkutan di darat dalam memastikan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa akan budaya keselamatan berlalu lintas
Sumber : Dishub Sultra (2025)

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara berperan aktif mendorong kampanye keselamatan melalui sosialisasi di sekolah, komunitas pengemudi, serta pelaku angkutan penyeberangan dan laut antarpulau. Upaya ini menunjukkan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, di mana keselamatan diposisikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator, dan masyarakat pengguna jasa transportasi.

Dampak Reformasi terhadap Kepercayaan Publik

Pelayanan transportasi yang semakin baik berdampak pada meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat (Purnandika & Septiana, 2023; Sedayu & Salsabilla, 2021). Kepercayaan publik adalah elemen penting dalam stabilitas politik dan sosial. Negara yang dipercaya rakyatnya memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan global (Almubaroq et al., 2025). Dengan demikian, reformasi pelayanan publik di sektor perhubungan bukan hanya agenda administratif, tetapi strategi bela negara yang memperkuat fondasi kebangsaan melalui pelayanan yang adil dan berkualitas.

Dalam kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara, peningkatan kualitas layanan transportasi memiliki makna strategis karena kondisi wilayahnya yang tersebar antara daratan dan kepulauan (Hasina & Satyadharma, 2023). Masyarakat di wilayah seperti Wakatobi, Buton, dan Konawe Kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut untuk akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi kebutuhan pokok. Ketika jadwal pelayaran lebih pasti, keselamatan meningkat, dan tarif lebih transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pusat ikut menguat (Maryati, 2025). Hal ini mengurangi rasa keterisolasian wilayah kepulauan serta memperkuat integrasi sosial-ekonomi antar daerah. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, karena mereka merasa dilayani dan diperhatikan (Heri & Supardal, 2024). Dengan demikian, perbaikan layanan transportasi di Sulawesi Tenggara bukan hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan ketahanan wilayah sebagai bagian dari ketahanan nasional.

SIMPULAN

Aktualisasi bela negara melalui reformasi pelayanan publik di sektor perhubungan merupakan wujud nyata pertahanan non-militer yang berakar pada profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab aparatur negara. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, konteks kewilayahan yang terdiri atas 17 kabupaten/kota dengan karakteristik daratan dan kepulauan menempatkan transportasi sebagai urat nadi integrasi sosial dan ekonomi. Reformasi pelayanan melalui digitalisasi, peningkatan keselamatan, penguatan integritas ASN, serta perluasan konektivitas wilayah terbukti tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah sebagai bagian dari ketahanan nasional. Partisipasi masyarakat dalam budaya keselamatan transportasi semakin menegaskan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, pelayanan transportasi yang adil, aman, dan inklusif merupakan manifestasi nyata bela negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Tenggara.

Pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara perlu terus memperkuat integrasi layanan transportasi berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Edukasi keselamatan transportasi harus diperluas. Selain itu, penguatan kapasitas dan integritas ASN perlu dilakukan berkelanjutan agar reformasi pelayanan benar-benar mencerminkan nilai bela negara dalam praktik birokrasi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. S., Ashari, H. A. A., Suharsono, J. P., Ramadanti, G., Apriansyah, M. R., Sulistiyawan, H., & Triandeda, K. D. (2024). Urgensi Pendidikan Bela Negara di Era Society 5.0 (Tantangan dan Peluang). *Journal on Education*, 6(4), 19343–19354. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5868>
- Akhyar, A. (2023). Kualitas Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Mengenai Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(2), 103–113. <https://doi.org/10.33627/pk.62.1246>
- Almubaroq, I. H. Z., Perwita, A. A. B., Sarjito, I. A., Asmoro, R. D., Purwantoro, I. S. A., Hartono, U., & Dewanto, I. H. (2025). *Mengelola Ketidakpastian: Strategi Pertahanan di Tengah Dinamika Global*. Indonesia Emas Group.
- Asriyati, Sahupala, R., Musa, I. L., Nasiru, A., & Satyadharma, M. (2025). Pembekalan Nilai-Nilai ASN Berakhlak dan Etika Birokrasi bagi Pegawai P3K UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Daratan Dishub Sulawesi Tenggara. *Rakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–9. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/rjpk/article/view/80>
- Bénichou, W. (2024). Sustainable development of transport infrastructure in the system of national economy. *Journal of Economics, Innovative Management and Entrepreneurship*, 1(1). <https://doi.org/10.59652/jeime.v1i1.116>
- Candra, R., Fahira, W., Halim, H. H., Pahlevi, R., Anugrah, N., Ramadhan, A., & Nawawi, J. F. (2025). Peran Pancasila Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 4(1), 35–43.
- Faridah, S., Timur, F. G. C., & Afifuddin, M. (2023). Karakter Bangsa dan Bela Negara: Menumbuhkan Identitas Kebangsaan dan Komitmen Nasionalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2532–2539. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5863>
- Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat, H. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 74–78. <https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.74-78>
- Hado, Sulisty, G. A., Ahiula, Satyadharma, M., Nang, S. F., & Asriyati. (2025). Evaluasi Kepuasan Penumpang Pada Pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Amolengo. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 199–207. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/58>
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246–256. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.112>

- Hendrayady, A., Sari, A. R., Mustanir, A., Amane, A. P., Isa, R., Agusman, Y., Arief, M. H., & Sari, D. P. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik Edisi Pertama*. Global Eksekutif Teknologi.
- Heri, A., & Supardal. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1376–1388. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.685>
- Hidayatullah, H. (2026). *ASN BERAKHLAK di Era Digital: Etika, Integritas, dan Pelayanan Publik*. Tren Digital Publishing.
- Ibrahim, A. W., Ahmad, I., & Moonti, R. M. (2024). Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Angkutan Antar Provinsi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 60–72. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.983>
- Irawan, E. P., Minarsi, A., Rianty, E., Halim, B., Putri, R. N. I., & Juansa, A. (2025). *Komunikasi Pelayanan Publik*. Star Digital Publishing.
- Jamasy, O., & Sunarto, B. J. T. G. E. (2025). *Bangkit Untuk Negeri Bersama Dalam Bela Negara*. Alungcipta.
- Jinca, M. Y., & Humang, W. P. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Wilayah Kepulauan*. Nas Media Pustaka.
- Karim, A., Lesmini, L., Sunarta, D. A., Suparman, A., Yunus, A. I., Khasanah, Marlita, D., Saksono, H., Asniar, N., & Andari, T. (2023). *Manajemen Transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kartono, S., & Fatmawati, S. S. (2020). *Partisipasi Bela Negara*. Alprin.
- Khoerotunnisa, N., Qolbi, T., Kurniawan, A. A., & Qurratunnisa, A. S. (2025). Pemerataan yang tidak Merata: Infrastruktur dan Kesenjangan Sosial Pemicu Krisis Nasionalisme. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 552–556. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/637>
- Kustiningsih, H., & Soleh, M. I. (2025). Strategi Peningkatan Peran Widyaiswara Dalam Mewujudkan ASN Adaptif. *Prosiding PITNAS Widyaiswara*, 1(1), 602–614. <https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/pitnas2024/article/view/383>
- Kusuma, K. C. D., Hermanto, K. L. P. D. I. D., Rudiawan, L. T. P. D. I. B., Amiruddin, M., & Han, M. (2024). *Manajemen Bela Negara: Konsep dan Tata Kelola Bela Negara Menuju Indonesia Emas*. Indonesia Emas Group.
- Laode, R. T., Satyadharma, M., Susanti, N., Cahyaniza, Wirayanti, P., & Hado. (2025). Analysis of Management of Supervision and Law Enforcement of Public Goods Transportation in Regency of North Kolaka. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy*, 1(1), 20–29. <https://sinergijournal.id/index.php/sjgp/article/view/48>
- Latullah, R. H., Sulisty, G. A., Satyadharma, M., & Hado, H. (2025). Collaborative Governance dalam Pengawasan Angkutan Barang Umum yang Berkontribusi terhadap Program Zero Over Dimension dan Over Loading. *Journal of Engineering and Applied Technology*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.65310/ty3esh07>
- Maryati, A. (2025). *Revolusi Biru: Kebijakan Publik Sektor Maritim di Indonesia*. Indonesia Emas Group.
- Maudia, R. A. (2024). Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Dinas Perhubungan (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). *Business Internship Symposium*, 1(1). <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/bis/article/view/4405>
- Maulidya, A. (2025). Kajian Tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus di Kota Metro, Lampung). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 850–861. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1147>
- Mokui, H. T., Satyadharma, M., Prasetyo, E. W., & Putera, Z. (2023). Desain Digitalisasi Jadwal dan Rute Kapal Feri di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil*, 7(3), 300–310. <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering/article/view/4782>
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Musa, A., Supu, H., Syarif, S. W., Kadir, S. S., Datau, N., Rasid, M., & Labino, R. I. A. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 235–250. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1738>
- Murtopo, A., Martono, A. D., & Budiyo. (2024). Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Meningkatkan Kesadaran Bela Negara. *JURNAL DWIJA KUSUMA*, 12(2), 93–104.

- <https://doi.org/10.63824/jdk.v12i2.227>
- Muzaki, M., Martini, N. N. P., Susbiyani, A., & Qomariah, N. (2023). Pengaruh Kualitas dan Inovasi Pelayanan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Melalui Kepuasan Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 19(2), 247–267. <https://doi.org/10.31967/relasi.v19i2.856>
- Naufal, M. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Konektivitas Antar Pulau Melalui Transportasi Laut di Tambelan. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 10(1), 24–32. <https://doi.org/10.25299/wedana.2024.13524>
- Pratiwi, S. F., Zalukhu, L. A., & Hamiza, A. R. (2025). Digitalisasi Dalam Birokrasi Publik: Meningkatkan Pelayanan Publik Serta Mendorong Perubahan Organisasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12605–12614. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/3927>
- Purnandika, R. A., & Septiana, H. (2023). Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Pengguna Transportasi Umum di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(2), 25–32. <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i2.226>
- Purnomo, R. A., Aviantoro, D., Santoso, A., & Astuti, I. P. (2020). *Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. Gracias Logis Kreatif.
- Puspitasari, A., Sujana, N., & Muhtadi, Y. (2024). Inovasi Sektor Publik Dalam Layanan Transportasi Publik di Kota Tangerang (Studi Kasus Pada Layanan Transportasi Umum “Si Benteng”). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 57–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10464435>
- Putrantono, A. H., & Supriyono, T. S. (2025). Peran BABinsa KORAMIL 0811/09 Dalam Meningkatkan Nilai Bela Negara Siswa SMK Jatirogo Melalui Pelatihan Baris-Berbaris. *JURNAL DWIJA KUSUMA*, 13(1), 33–39. <https://doi.org/10.63824/jdk.v13i1.300>
- Putri, M. F. J. L., Sitompul, P. H. S., Sasmita, S. K., Siallagan, J., & Kurniati, P. (2025). *Pendidikan Bela Negara*. Basya Media Utama.
- Rajulan, M., Sulisty, G. A., & Satyadharma, M. (2025). Semangat Pahlawan sebagai Teladan dalam Membangun Transportasi Berkeadilan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 03(04), 1326–1334. <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1536>
- Ramadhany, R., Rustiyana, R., Rianty, E., Baskoro, S. E., Hardini, I. R., & Anitasari, M. (2025). *Transformasi Digital Sektor Publik*. Star Digital Publishing.
- Rosyid, A., Setiawan, M. I., Nasihien, R. D., Razi, M. A. M., Isradi, M., Muchayan, A., & Sukoco, A. (2021). Integrasi Transportasi Publik Dalam Mendukung Pembangunan Daerah. In *E-Mobility| Sustainable Mobility Transportasi Publik dan Teknologi GIS Mendukung Peningkatan Pembangunan Daerah* (pp. 8–25). IPEST.
- Rusmanto, W., Permatasari, A., & Sopandi, E. (2025). *Governansi Digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Sari, A. R. (2024). *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sedayu, A., & Salsabilla, W. A. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Konsumen Bus Rapid Trans Semarang di masa Pandemi Covid-19. *JURNAL EKVIVALENSI*, 7(2), 250–264. <https://doi.org/10.51158/ekuivalensi.v7i2.579>
- Setiawati, I. R., Satyadharma, M., Tepu, D., Jusra, K., & Sjachrawy, L. O. M. I. (2025). Analisis Framing Terkait Kebijakan Inovasi Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 2(3), 414–421. <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/162>
- Siagian, T. M. N. (2025). Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Fokus Administrasi Publik*, 1(2), 173–182. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/japn/article/view/2909>
- Sjachrawy, L. O. M. I., Thasman, T., Satyadharma, M., Susanti, N., & Hado, H. (2025). Transformasi Birokrasi melalui Inovasi Pelayanan Publik: Kajian Literatur tentang Reformasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 5(1), 37–52. <https://doi.org/10.51454/z7ysp660>
- Soares, E. M. P. (2025). *Etika Pemerintahan Daerah Jalan Menuju Pelayanan Publik Yang Berkeadaban*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436–456. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>

- Steviani, D. S. (2020). Implementasi Nilai Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(3), 261–268. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i3.180>
- Sulistyo, G. A., & Satyadharma, M. (2025). Ekonomi Berbagi dan Disrupsi Pasar Transportasi di Indonesia: Kajian Literatur atas Peran Transportasi Online dalam Transformasi Ekonomi. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(1), 29–40. <https://scriptaintelektual.com/ascendia/article/view/75>
- Sunaini, W., & Satyadharma, M. (2025). Manajemen Talenta dan Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara: Suatu Kajian Literatur pada Sektor Publik Indonesia. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 80–90. <https://scriptaintelektual.com/scripta-economica/user/setLocale/id?source=%2Fscripta-economica%2Farticle%2Fview%2F69>
- Syaiful, S., Laode, T., Ahzar, L. M., Firmansyah, F., Satyadharma, M., Susanti, N., Hado, H., Sulistyo, G. A., & Almaliki, M. F. (2025). Peningkatan Kinerja Terminal dan Kepatuhan Pengemudi Angkutan Umum di Kabupaten Kolaka Utara. *INANTA | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.64344/inta.v1i2.61>
- Tajrida, D. A., Suswandina, I., & Mariani, M. (2025). Urgensi Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional di Era Globalisasi. *Journal of Education*, 1(2), 230–239. <https://doi.org/10.1234/p9qy8k87>
- Trisia, S., & Azairin, M. P. (2024). Zona Integritas dan Ironi Perilaku Koruptif Aparat Penegak Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 216–238. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/384/129>
- Widyastuti, Y., Rahayu, S., & Rizkiyani, T. (2024). Praktek Etis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 8(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v8i1.22543>
- Yulianto, A., & Harsoyo, H. (2023). Kualitas Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) Bertaraf Internasional. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(2), 246–261. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1136>
- Yulnelly, Y., & Setiyawati, M. E. (2022). Pemahaman Nilai-nilai Bela Negara Generasi Muda Dalam Menghadapi Informasi Di Era Digital. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 122–132. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2298>
- Yunita, E., Margiyanti, I. Y., Alawiyah, S., & Triadi, I. (2023). Penerapan Nilai Nilai Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 40–57. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.713>
- Yunus, M., Mawardi, T. F., Alexandri, M. B., Satria, R., Tabrani, M., Kesuma, T. M., & Siregar, M. R. (2024). *Investasi dan Reformasi Transportasi Kota*. Syiah Kuala University Press.